

PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN JEPANG

Nur Fitri

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas
Ameeeeeng857@gmail.com

Abstract

The history of the journey of the Indonesian nation cannot be separated from the role of Muslims, especially in the struggle to expel colonialists from Indonesian land. Through the field of education, Muslim leaders established Islamic education to strengthen the foundation of religion and invite the community to resist the education system brought by the Dutch colonizers. The Islamic education system is the only formal education that has its own system and administration, different from the education system applied in the Netherlands. The Dutch government's strict and harsh regulations on the operation of Indonesian madrassas and pesantren did not paralyze and damage Islamic education. On the other hand, the spirit of Islam continued to be well preserved where the ulama and kyai were not cooperative with the Dutch and moved from places close to the Netherlands. The Islamic education system experienced similar pressures during the Japanese education period. Where the Japanese government requires its teachers to learn Japanese and respect Tenno (emperor). The strong principles of Islamic education leaders show the ability of Islamic education to live itself according to Islamic principles without being influenced by any powerful power.

Keywords: Islamic education, colonial period, Colonial Pressure.

Abstrak

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran umat Islam khususnya dalam perjuangan mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Melalui bidang pendidikan, para pemimpin umat Islam mendirikan pendidikan Islam untuk memperkuat fondasi agama dan mengajak masyarakat untuk melawan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sistem pendidikan Islam merupakan satu-satunya pendidikan formal yang mempunyai sistem dan administrasi tersendiri, berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan di Belanda. Peraturan pemerintah Belanda yang begitu ketat dan keras terhadap operasional madrasah dan pesantren Indonesia tidak melumpuhkan dan merusak pendidikan Islam. Di sisi lain, semangat Islam terus terpelihara dengan baik dimana para ulama dan kyai tidak kooperatif dengan Belanda dan berpindah-pindah dari tempat yang dekat dengan Belanda. Sistem pendidikan Islam mengalami tekanan serupa pada masa pendidikan Jepang. Dimana pemerintah Jepang mewajibkan gurunya untuk belajar bahasa Jepang dan menghormati Tenno (kaisar). Kuatnya prinsip pemimpin pendidikan Islam menunjukkan kemampuan pendidikan Islam dalam menghidupi dirinya sesuai prinsip Islam tanpa dipengaruhi oleh kekuatan manapun yang berkuasa.

Kata Kunci: pendidikan Islam, masa kolonial, Tekanan Kolonial.

Pendahuluan

Perang Dunia Kedua yang meluas ke kawasan Asian-Fasifik membawa perubahan politik di Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi objek kembali Jepang. Serangan Jepang di Indonesia diawali dengan menguasai Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942 kemudian mencapai Minahasa, Balikpapan dan Ambon(Adam.C.2007:201-207). Kemudian pada bulan Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, serta Palembang dan Bali.

Sesampainya di Indonesia, Jepang menganggap Palembang sebagai tempat pendudukannya(Hardy, hal.177). Palembang penting bagi Jepang karena letaknya yang sangat strategis, antara kekuasaan Batavia di Jakarta dan Singapura, pusat posisi Inggris di Asia Tenggara. Setelah Palembang, Jepang berangkat ke Pulau Jawa, menyerang Banten, Indramayu, Krangan(antara Rembang dan Tuban). Mereka kemudian menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) (M.C. Ricklef, 2008:422). Pasukan Belanda di Jawa menyerah tanpa syarat kepada Panglima Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian Indonesia menjadi bagian dari kekuasaan kolonial Jepang(Saifudin dan Saepuddin D, 2020).

Sejak saat itu, seluruh wilayah Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Kondisi ini mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jepang dikenal lebih fasih dibandingkan Belanda. Jepang menduduki berbagai Negara dalam upaya perluasan politik dan militer, pendudukan tersebut dilakukan secara militer. Oleh karena itu, sejak Jepang menguasai wilayah Indonesia, kehidupan dan nasib Bangsa Indonesia berada dibawah bayang-bayang pendudukan Jepang. Selain menguasai kehidupan politik, ekonomi, dan militer, Jepang juga berupaya menguasai pendidikan masyarakat Indonesia. Jepang melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia, dibalik semua itu, tujuan utama Jepang adalah menguasai dan menjajah Indonesia. Jepang menerapkan berbagai kebijakan agar pendidikan Indonesia Mendukung perang yang sedang berlangsung. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan , permasalahan utama yang diteliti adalah dampak pendudukan Jepang terhadap sistem pendidikan Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu proses mengkaji dan menganalisis secara kritis editorial buku referensi dan mengkaitkannya dengan kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Metode sejarah digunakan dalam penulisan artikel ini dilakukan dalam empat tahap penelitian, yaitu: (1) pengumpulan heuristik, bahan atau sumber melalui penelitian kepustakaan, (2) pemilihan informasi yang dikumpulkan melalui kritik terhadap sumber, baik internal maupun eksternal (3) Interpretasi (4) Histografi (Syamsudin, Helius:2007:7).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Jepang terhadap sistem Pendidikan Indonesia

Kebijakan Jepang terhadap sistem pendidikan Indonesia Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Negeri). 6 Tahun studi termasuk Sr, sekolah pertama merupakan variasi dari nama sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi penduduk asli Hindia Belanda.
2. Pendidikan lebih lanjut terdapat dua program pendidikan berkelanjutan yaitu Shoto Chu Gakko(Sekolah Menengah Pertama) dengan masa studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko(Sekolah Menengah Atas) juga dengan masa studi 3 tahun.
3. Pelatihan Profesional, terdiri dari sekolah menengah profesional, termasuk sekolah pertukangan, kelautan, pendidikan, teknik dan pertanian.
4. Pendidikan tinggi(Suwendi, 2004).

Sistem pendidikan di atas merupakan salah satu tanda kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai berdirinya lembaga pendidikan seperti Madrasah dan Pesantren didaerah terpencil. Di sisi lain pemerintah Jepang juga menyelenggarakan kursus sekolah dan pelatihan bagi calon guru.

Sekolah untuk calon guru adalah:

1. Sekolah Pelatihan Guru 2 tahun bernama Sjootoo Sihan Gakkoo.
2. Sekolah Menengah 4 tahun untuk Guru bernama Cutoo Sihan Gakkoo.
3. Sekolah Menengah Guru 6 tahun disebut kootoo Sihan Gakkoo(Posponegoro dan Notosusanto, 1993:83).

Pendirian beberapa sekolah oleh pemerintah Jepang sebenarnya berkaitan dengan upaya memperkenalkan ideologi Jepang yaitu Hakko Icchiu(kemakmuran bersama). Sekolah baru itu menjadi landasan pengenalan dengan Jepang. Tugas para Guru adalah menyebarkan ideologi Hakko Ichu. Guru dilatih di pusat pelatihan di Jakarta. Setiap distrik mengirimkan calon Guru untuk mengikuti pelatihan, asalkan terdapat persetujuan dari pemimpin Jepang.

Sekembalinya ke daerahnya, para Guru tersebut terpaksa menanamkan Ideologi Hakko Ichu kepada siswanya, serta masyarakat di daerahnya(Imran,2018:76). Selain itu, kebijakan pendidikan militer bangsa Indonesia seperti Heiho atau Organisasi militer dan PETA dibentuk untuk pemuda Jepang(Posponegoro dan Notosusanti:1993). Heiho dan PETA menjadi tempat latihan militer yang diperoleh , militer Jepang, yang kemudian digumakan untuk latihan militer yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Republik Indonesia. Melalui Heiho, mempraktikkan garis barbar, belajar menggunakan senjata, menerapkan strategi , militer menjadi pengalaman belajar gratis bagi pemuda Indonesia dalam pelatihan militer.

Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda pada Perang Dunia II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dan mengusung semboyan “Asia Timur Raya untuk Asia”. Pada babak pertama, pemerintah Jepang tampil melindungi kepentingan Islam, sebuah tpu muslihat untuk tujuan Perang Dunia II. Mereka berbagai kebijakan untuk mengirim umat Islam Indonesia, antara lain:

1. KUA(Biro Agama), yang pada zaman Belanda disebut Voor Islamistiscche Sake, dipimpin oleh orientasi Belanda, Jepang menjadi Biro Sumubi, dipimpin oleh Ulama sendiri adalah KH. Hasyim Asy’ari dari Jombang, Jawa Timur.
2. Pihak berwenang Jepang sering mengunjungi dan membantu sekolah berasrama besar.
3. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan pasukan Hizbullah untuk memberikan pelatihan dasar militer kepada pemuda Muslim.
4. Pemerintah Jepang juga mengizinkan pendirian Perguruan Tinggi Islam yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Mohammad Hatta di Jakarta.
5. Ulama diperbolehkan membentuk pembela tanah air (PETA) DENGAN PEMIMPIN NASIONALIS.
6. Umat Islam mempunyai hak untuk melanjutkan organisasi bernama Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang bersifat komunal.

Niat pemerintah Jepang untuk tampil melindungi kepentingan Islam tidak lain adalah upaya Jepang untuk mengorganisasikan kekuatan Islam dan Nasionalis Indonesia agar dapat dikembangkan untuk kepentingan Perang Besar Asia Timur yang dipimpin Jepang. Dunia pendidikan seharusnya dikembangkan, namun banyak yang terabaikan. Sehari-harinya para siswa di sekolah tersebut hanya disuruh berolahraga, berjalan kaki, menyanyi, dan lain-lain. Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya(Zuhairi,2011:150-152). Tujuan pendidikan kolonial Jepang secara umum mencakup dua isu utama, yaitu penguatan keyakinan Islam itu sendiri dan perlindungan hak asasi manusia melalui perlawanan politik atau militer.

Di antara tujuan pendidikan yang tercantum dalam pendidikan Jepang adalah:

1. Tujuan pokok Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sejati dan prinsip bela diri dakwah Islam, Amar ma’ruf Nahi munkar.
2. I.N.S (Indonesische Nederlansche School) diprakasai oleh Muhammad Syafi’i pada tahun 1899 hingga 1969 dan bertujuan untuk mendidik anak berfikir rasional, bekerja keras, dan mengembangkan manusia yang berkarakter serta menanamkan persatuan.
3. Sebelum menjadi partai politik, Nahdatul Ulama ingin mempertahankan empat aliran pemikiran selain melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam(Rohidin,2004:19).

Ramaliyus(2011:279) mengatakan bahwa sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam mungkin lebih lembut, sehingga keadaan pergerakan pendidikan lebih bebas

dibandingkan pada masa penjajah Belanda. Hal ini memberi peluang bagi berkembangnya pendidikan Islam:

1. Pada masa awal kependudukan Jepang, madrasah berkembang pesat terutama dalam jumlah. Hal ini terutama terlihat di wilayah Sumatra yang terkenal dengan madrasah yang diilhami oleh Majelis ulama tinggi.
2. Pendidikan agama disekolah penuh karakter, hal ini kemungkinan para Ustadz Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan dalam ajaran agama tersebut juga memasukkan ajaran tentang jihad melawan para penyerang.
3. Perguruan Tinggi Islam Jepang mengizinkan pendirian perguruan tinggi Islam yang dipimpin oleh KH Wahid Hasyim, KH Muzakkar dan Bung Hatta di Jakarta.

Meskipun Jepang berusaha melakukan pendekatan terhadap umat Islam dengan memberikan kebebasan beragama dan mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak menyerah kepada pemerintah Jepang jika mengganggu keimanan masyarakat, hal ini terlihat pada masa perjuangan Jepang KH. Hasyim Asy'ari dan lingkungan sekolah asrama Islam menentang kebijakan Seikere kufur Jepang (menghormati kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari).

Akibat sikapnya tersebut, Jepang menangkapnya dan memenjarakannya selama 8 bulan. Rmamaliyus juga mencatat bahwa dunia pendidikan pada umumnya terabaikan karena siswa disekolah tersebut setiap hari diminta untuk berlatih, berbaris melakukan pengabdian masyarakat, bernyanyi dan lain-lain. Madrasah-madrasah disekitar Pesantren terbilang beruntung, terbebas dari kendali langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan di Pesantren dapat tetap berjalan normal.

Pelatihan yang dilakukan Jepang dirusak oleh satu hal, yaitu penerapan sistem pelatihan militer. Sistem pendidikan dan kurikulum disesuaikan dengan tujuan masa perang. Siswa harus menjalani pelatihan dasar militer dan menghafal lagu kebangsaan Jepang. Demikian pula Guru harus menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia bukan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar disekolah. Oleh karena itu, guru harus mengikuti kursus bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian, sistem pendidikan yang diperkenalkan Jepang di Indonesia mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan sistem pendidikan yang dilakukan di Belanda, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pendidikan lebih bebas namun terbatas pada kelompok tertentu, sedangkan konsep diskriminasi berlaku pada masa Jepang.

Selain itu kualitasnya menurun drastis baik dari segi pengetahuan maupun kualitas siswa dan guru. Kondisi ini tidak lepas dari tujuan pemerintah Jepang melalui pendidikan, Jepang berupaya untuk menghasilkan kader-kader yang akan menjadi pionir dan mewujudkan konsep kesejahteraan bersama Asia Timur Raya yang diimpikan Jepang. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah desakan pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia menghormati Tenno(Kaisar) yang dipercaya sebagai keturunan Dewa Matahari (Omikami Omitation). Membungkuk dihadapan Tenno disebut Seikeirei. Ucapan Seikeirei ini biasanya diikuti dengan lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo). Tidak semua masyarakat

Indonesia bisa menerima praktik ini, terutama dikalangan umat beragama. Penerapan Seikeirei mendapat tantangan dari umat Islam, salah satunya adalah perlawanan dari KH. Zainal Mustafa, Direktur Pondok Pesantren Sukamah Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Singapura (Hasbullah,1996:116-117).

Dampak Sistem Pendidikan Belanda dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam

Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia sangat merugikan bangsa Indonesia, namun dengan semangat patriotisme dan nasionalisme, para aktivis dan ulama berjuang membentuk organisasi untuk menyelamatkan nilai-nilai Islam dari penjajah dan menyelamatkan bangsa dari kezaliman dan kebodohan. Setelah masa pemerintahan Maulana Malik Ibrahim banyak perhatian diberikan pada pendidikan Islam. Selama 20 tahun, raja terus melatih kader Muballigh melalui Pesantren. Pendidikan Islam melalui Pesantren juga berlangsung di wilayah kerajaan, misalnya di Kalimantan ada Sistem Pembelajaran Kitab, terutama cara menterjemahkannya ke dalam bahasa daerah. Di wilayah Maluku berbeda, keberlangsungan pendidikan Islam tidak benar-benar ada, hal ini disebabkan adanya tantangan sosial baik internal maupun eksternal. Tantangan dari dalam adalah Komunitas Kristiani bersatu dan Intensif mengembangkan karya misioner. Sementara itu tantangan eksternalnya adalah pengembangan tugas hasil pertanian, VOC juga berfungsi sebagai corong pengembangan kristiani. Misi VOC menawarkan dukungan dan kebebasan kepada umat Kristiani dalam upaya Kristensasi mereka di Maluku (Ibdh,142).

Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang telah ada sejak lama dan mengakar kuat di masyarakat, yang sistemnya sangat berbeda dengan sistem yang diperkenalkan oleh Belanda. Dengan demikian sistem yang digunakan di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Sistem yang ditawarkan Belanda adalah sistem Sekolah Seluler yang tidak mengakui ajaran agama.
2. Pendidikan di Pesantren yang hanya mengakui agama (Samsul Nizar, 2008-2009).

Pendidikan yang dikelola Belanda terutama berfokus pada pengetahuan dan keterampilan duniawi, yaitu Pendidikan umum. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan Islam lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk menghayati agama.

Pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia sebelum kemerdekaan pada masa pemerintahan Belanda yaitu:

1. Sekolah Madrasah Adabiyah Padang Panjang didirikan oleh H. Abdullah pada tahun 1907. Sekolah ini kelas satu dan menggunakan bangku, meja dan papan. Sekolah tersebut tidak bertahan lama dan digantikan oleh Madrasah Al Iqbal Al Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Taher Jamaluddin dari Singapura pada tahun 1914, Madrasah Adabiyah dihidupkan kembali HIS pertama di Minangkabau.

2. Sekolah Madrasah Diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai El Yunisi pada tahun 1915 di Minangkabau menggunakan sistem alat tulis dan peraga modern.
3. Madrasah Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1923 di Yogyakarta.
4. Madrasah Sumatra Tawalib didirikan oleh Syekh AbdulnKarim Amrullah pada tahun 1921 di Padang Pnjang.
5. Madrasah Sajadah Abdiyah didirikan oleh TeukunBeureuh pada tahun 1930 di Sigli(Aceh) (Hayati Nizar, 2006:143).

Kehadiran alumni-alumni muda asal Timur Tengah menginspirasi mereka untuk melakukan perubahan dibidang pendidikan, sehingga memunculkan anggapan bahwa sistem sorogan dan halaqah pesantren harus diperbaharui ke sistem klasikal. Perubahan sistem ini disusul dengan munculnya madrasah. Madrasah pertama yang didirikan menurut Mahmud Yunus adalah Madrasah Al- Adabiyah di Minangkabau-Padang bahkan madrasah ini dianggap sebagai madrasah di seluruh Indonesia. Di sisi lain, gagasan reformasi juga muncul di Surabaya dimulai dengan berdirinya kelompok didiskusi Taswir Al-Afkar yang didirikan oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Masur. Taswir Al-Afkar menjai kelompok kerja Nahdatul Watan yang kemudian mendirikan satu madrasah di kota Surabaya yang diberi nama Madrasah Hisbul Watan, Madrasah Ahlul Watani Wonokromos, Madrasah Gresik Furu' Al-Watani dan Hidayat Al-Watani di Jombang.

Perbedaan antara Pesantren dan Madrasah adalah Pesantren menganut sistem sorogan dan halaqah, sedangkan Madrasah menganut sistem klasikan. Selain itu bahan ajarnya juga berbeda antara keduanya, Pesantren hanya mengajarkan pelajaran agama, sedangkan Madrasah mengajarkan pelajaran agama dan pelajaran umum(Slamet Effendi Yusuf,37).

Kesimpulan

Ketika Jepang berkuasa, pendidikan Islam terbilang lebih liberal dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Namun Jepang sesuai mandatnya mewajibkan gurunya belajar bahasa jepang dan mengganti bahasa belanda dengan bahasa Indonesia saat mengajar dikelas termasuk menghormati Tenno(Kaisar). Hal ini tidak diterima oleh para pemimpin Muslim dan kemudian mereka ditangkap. Pengaruh sistem Pendidikan Belanda dan Jepang memunculkan tokoh-tokoh Islam yang membentuk gerakan reformasi pemikiran keagamaan. Pendidikan Islam terus berkembang pesat meskipun Belanda dan Jepang menghadapi tantangan dan hambatan yang sulit. Setelah Indonesia Merdeka, diskriminasi yang dilakukan penjajah Belanda dan Jepang dihapuskan. Indonesia tidak melakukan deskriminasi terhadap warga negaranya berdasarkan ras, asal usul, agama atau kepercayaan. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun di sana-sini masih ada jejak diskriminasi kolonial yang harus dihilangkan. Di sisi lain, ada hal yang bisa dipetik dari penjajahan yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pendidikan sistem yang sesuai dengan ajaran islam.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Taufik. Sejarah Umat Islam Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001.
- Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Muadalah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam-Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren, 2009.
- Enung, K. Rukiati dan Hikmawati Fenti, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006. Fahmi, Asmah Hasan. Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Hamzah Amir, Wirjosukrto. 1985. Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam, cet. Iv. Jember: Muria Offset.
- Hasbullah. 1996. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hayati Nizar, *Analisis Historis Pendidikan Demokrasi di Minangkabau (Majallah Hadharah PPS IAIN Imam Bonjol Bapang*, vol 3 edisi Pebruari 2006), h. 143.
- Ibidh, h. 142
- Jalaluddin. 1990. Kapita Selekta Pendidikan. Jakarta: Kalam Mulia.
- Nasution, Harun. 1992. Ensiklopedia Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Nizar, Samsul (ed). 2008. Sejarah Pendidikan Islam “Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ramayulis. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
- Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, (cet II, Jakarta: Prenada, 2008), h. 298.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2004. Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa “Visi, Misi dan Aksi,” Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Slamet Efendi Yusuf, *op cit.*, h. 37.
- Wahab, Rohidin FZh. 2004. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Yunus, Mahmud. 1985. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hadikarya.
- Zuhairi, dkk. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.